

PERJANJIAN KINERJA BALAI P3KP NUSA TENGGARA II



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hamdan Pare**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**

Jabatan : Direktur Jenderal Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sri Haryati

NIP. 197107071997032004

Jakarta, 09 Agustus 2025

Pihak Pertama

Hamdan Pare

NIP. 197005102009111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II
DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni di perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1 Unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah tidak layak huni di perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II
 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur

PAGU APBN

Rp. 1.151.127.000,00

Rp. 19.123.268.000,00

Rp. 20.274.395.000,00

Jakarta, 09 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKOTAAN


SRI HARYATI

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA
 TENGGARA II**


HANDAN PARE